

Analisis Situasi Kerentanan Pangan di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2013

(Analysis of Food Vulnerability Situation in Jatiroto Sub District Lumajang at 2013)

Sakinatun Nisa', Leersia Yusi Ratnawati, Sulistiyani
Bagian Gizi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember
Jalan Kalimantan 37, Jember 68121
e-mail korespondensi: sakina.292@gmail.com

Abstract

Analysis of food vulnerability based on village is very important to sharpen the result because every village has different character. Jatiroto sub district as the only one area with food and nutrition insecurity at 2013 needs to analyze based on village. This study was aimed to analyze food vulnerability problem in. This descriptive study designed using secondary data of three aspects of Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) such as aspect of food availability, aspect of food access and livelihood, and aspect of food utility by Badan Ketahanan Pangan (BKP) in 2012. The data processing began by calculating the three aspects of FSVA which consists of seven indicators namely number of food retailer, percentage of poor family, good road access, percentage of households without access to electricity, number of underweight, number of children and mother mortality, and number of health facilities. Jatiroto sub district consisting of 6 villages and the result of the analysis showed that mostly village in Jatiroto (4 villages) were in secure food situation, 1 village were in wary food situation and 1 village were in food vulnerability situation. The indicator that mostly contribute to food vulnerability in Jatiroto is number of underweight, percentage of households without access to electricity and percentage of poor family.

Keywords: FSVA, Food Security, Food Vulnerability, Food Insecurity, Jatiroto Sub District

Abstrak

Analisis kerentanan pangan berbasis desa sangat penting untuk hasil analisis yang lebih tajam karena setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda. Kecamatan Jatiroto merupakan satu-satunya kecamatan yang rawan pangan dan gizi pada tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah kerentanan pangan di tiap-tiap desa di Kecamatan Jatiroto. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder berdasarkan 3 aspek pada Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Peta FSVA) antara lain aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan dan penghidupan, dan aspek pemanfaatan pangan yang dikeluarkan oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP) pada tahun 2012. Pengolahan data dilakukan berdasarkan 3 aspek FSVA yang terdiri dari 7 indikator yaitu jumlah warung/toko kelontong, persentase penduduk miskin, akses penghubung yang memadai, persentase penduduk tanpa akses listrik, jumlah balita gizi kurang dan gizi buruk, kematian balita dan ibu melahirkan, dan jumlah sarana/fasilitas kesehatan. Hasil analisis dari 6 desa di Kecamatan Jatiroto menunjukkan bahwa mayoritas desa (4 desa) berada pada situasi tahan pangan, 1 desa berada pada situasi waspada dan 1 desa berada pada situasi rentan pangan. Indikator yang paling berpengaruh antara lain jumlah balita gizi kurang dan gizi buruk, persentase penduduk tanpa akses listrik dan persentase penduduk miskin.

Kata kunci: FSVA, Ketahanan Pangan, Kerentanan Pangan, Kerawanan Pangan, Kecamatan Jatiroto

Pendahuluan

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara fisiologis sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin baik kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu, pangan juga merupakan elemen penting dalam pembentukan SDM sebagai aset bagi pembangunan bangsa dan negara. Setiap orang memiliki hak atas pangan (*right to food*) dan penyelenggara negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak ini. Hak asasi atas pangan tersebut telah menjadi komitmen pemerintah, yang dinyatakan dalam UU No.18 Tahun 2012. Ketahanan pangan telah menjadi prasyarat dasar yang harus dimiliki oleh daerah otonom. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 yang menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah urusan wajib pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota [1].

Masalah kerentanan terhadap kerawanan pangan dapat menjadi pemicu terjadinya masalah gizi [1]. Kerentanan terhadap kerawanan pangan adalah kondisi yang membuat suatu masyarakat yang beresiko rawan pangan menjadi rawan pangan. Kerawanan pangan diartikan sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat, atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu tertentu (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien) [2].

Sebelum tahun 2005, belum ada sarana untuk menganalisa dan mengklasifikasi ketahanan dan kerentanan pangan di Indonesia secara nasional karena analisa masih dalam bentuk SKPG yang sifatnya kedaerahan. Pada tahun 2005, Dewan Ketahanan Pangan (DKP), Badan Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten bekerja sama dengan *World Food Programme* (WFP) menyusun Peta Kerawanan Pangan Indonesia (*Food Insecurity Atlas-FIA*) yang secara nasional diluncurkan pada bulan Agustus 2005. Pada tahun 2009 terjadi pergantian nama peta menjadi *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA). Seiring berjalannya waktu terjadi pengembangan peta baru dengan analisis yang lebih tajam. Pada tahun 2010-2011 disusun FSVA Provinsi dengan cakupan wilayah analisis tingkat kecamatan. Maka pada tahun 2012 Badan Ketahanan Pangan melaksanakan penyusunan FSVA Kabupaten dengan cakupan wilayah analisis sampai dengan tingkat desa dan indikator yang digunakan berbeda dengan peta sebelumnya [2].

Salah satu kecamatan di Kabupaten Lumajang yang memiliki jumlah kasus gizi buruk tertinggi serta menjadi satu-satunya kecamatan yang termasuk dalam daerah prioritas 1 pada Peta Rawan Pangan dan Gizi tahun 2013 adalah Kecamatan Jatiroto [6]. Oleh karena itu penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi titik kerentanan terhadap kerawanan pangan secara lebih tajam yaitu sampai pada tingkat desa melalui 7 indikator penyusunan peta FSVA Kabupaten dengan menggunakan analisis *principal component analysis* dan *cluster analysis* untuk mengukur bagaimana situasi kerentanan pangan di Kecamatan Jatiroto sebagai daerah prioritas 1 perlu dilakukan, sehingga diharapkan hasil analisis dapat digunakan sebagai salah satu informasi bagi pemerintah setempat untuk menyusun strategi yang efektif dan efisien terkait dalam penanggulangan masalah pangan dan gizi pada desa yang rentan terhadap kerawanan pangan dengan mengidentifikasi faktor yang berpengaruh pada kerentanan pangan di Kecamatan Jatiroto.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi penelitian adalah seluruh desa di Kecamatan Jatiroto yaitu sebanyak 6 desa. Sampel penelitian diambil dengan cara *total sampling* sehingga sampel penelitian ini adalah seluruh anggota populasi yang meliputi Desa Banyuputih Kidul, Desa Rojopolo, Desa Sukosari, Desa Kaliboto Kidul, Desa Kaliboto Lor dan Desa Jatiroto. Variabel dalam penelitian ini antara lain jumlah warung/toko kelontong, persentase penduduk miskin, akses penghubung yang memadai, persentase penduduk tanpa akses listrik, jumlah penderita gizi kurang dan gizi buruk, jumlah kematian balita dan ibu melahirkan, dan jumlah sarana/fasilitas kesehatan. Data berupa data sekunder yang diperoleh dengan cara studi dokumentasi kemudian diolah dengan menggunakan teknik analisis *Principal Component Analysis* dan dilanjutkan dengan *Cluster Analysis*.

Hasil Penelitian

Situasi Kerentanan Pangan berdasarkan Masing-masing Indikator di Tiap Desa di Kecamatan Jatiroto

Situasi kerentanan pangan dilihat dari urutan prioritas kerentanan pangan berdasarkan 7 indikator yang berasal dari 3 aspek FSVA. Urutan prioritas berdasarkan indikator jumlah warung/toko kelontong masing-masing desa di Kecamatan Jatiroto dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1. Urutan Prioritas berdasarkan Indikator Jumlah Warung /Toko Kelontong

Nama Desa	Jumlah Warung/Toko Kelontong	Prioritas	Keterangan
Sukosari	14	Prioritas 1	Rentan
Banyuputih Kidul	32	Prioritas 1	Rentan
Kaliboto Kidul	53	Prioritas 2	Waspada
Rojopolo	37	Prioritas 2	Waspada
Jatiroto	132	Prioritas 3	Tahan
Kaliboto Lor	101	Prioritas 3	Tahan

Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat 2 desa yang termasuk dalam kategori Prioritas 1 (Rentan) yaitu Desa Sukosari dan Desa Banyuputih Kidul, sementara terdapat 2 desa yang termasuk dalam kategori Prioritas 2 (Waspada) yaitu Desa Rojopolo dan Desa Kaliboto Kidul.

Urutan prioritas berdasarkan indikator persentase penduduk miskin masing-masing desa di Kecamatan Jatiroto dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2. Urutan Prioritas berdasarkan Indikator Persentase Penduduk Miskin

Nama Desa	Persentase Penduduk Miskin	Prioritas	Keterangan
Sukosari	13,50	Prioritas 1	Rentan
Rojopolo	9,77	Prioritas 1	Rentan
Kaliboto Lor	4,78	Prioritas 2	Waspada
Kaliboto Kidul	8,11	Prioritas 2	Waspada
Jatiroto	2,60	Prioritas 3	Tahan
Banyuputih Kidul	3,68	Prioritas 3	Tahan

Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat 2 desa yang termasuk dalam kategori Prioritas 1 (Rentan) yaitu Desa Sukosari dan Desa Rojopolo, sementara terdapat 2 desa yang termasuk dalam kategori Prioritas 2 (Waspada) yaitu Desa Kaliboto Kidul dan Desa Kaliboto Lor.

Urutan prioritas berdasarkan indikator akses penghubung yang memadai masing-masing desa di Kecamatan Jatiroto adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Urutan Prioritas berdasarkan Indikator Akses Penghubung yang Memadai

Nama Desa	Kondisi Jalan	Prioritas
Kaliboto Lor	2	Prioritas 3
Jatiroto	1	Prioritas 4
Kaliboto Kidul	1	Prioritas 4
Sukosari	1	Prioritas 4
Rojopolo	1	Prioritas 4
Banyuputih Kidul	1	Prioritas 4

Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar desa berada pada Prioritas 4 karena hampir semua desa di Kecamatan Jatiroto dapat dilalui oleh kendaraan roda empat sepanjang tahun. Namun terdapat satu desa yang berada pada prioritas 3 yaitu Desa Kaliboto Lor karena jalan utama desa tidak dapat dilalui oleh kendaraan beroda empat pada saat

tertentu yaitu pada saat turun hujan, daerah tersebut berada di daerah Dusun Genitri.

Urutan prioritas berdasarkan indikator persentase penduduk tanpa akses listrik masing-masing desa di Kecamatan Jatiroto adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Urutan Prioritas berdasarkan Indikator Persentase Penduduk Tanpa Akses Listrik

Nama Desa	Persentase Penduduk tanpa Akses Listrik	Prioritas	Keterangan
Jatiroto	26,51	Prioritas 1	Rentan
Rojopolo	25,06	Prioritas 1	Waspada
Kaliboto Lor	23,93	Prioritas 2	Rentan
Banyuputih Kidul	19,79	Prioritas 2	Waspada
Kaliboto Kidul	12,54	Prioritas 3	Tahan
Sukosari	15,24	Prioritas 3	Tahan

Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat 2 desa yang termasuk dalam kategori Prioritas 1 (Rentan) yaitu Desa Jatiroto dan Desa Rojopolo, sementara terdapat 2 desa yang termasuk dalam kategori Prioritas 2 (Waspada) yaitu Desa Kaliboto Lor dan Desa Banyuputih Kidul.

Urutan prioritas berdasarkan indikator jumlah penderita gizi kurang dan gizi buruk masing-masing desa di Kecamatan Jatiroto adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Urutan Prioritas berdasarkan Indikator Jumlah Penderita Gizi Kurang dan Gizi Buruk

Nama Desa	Jumlah Penderita Gizi Kurang dan Gizi Buruk	Prioritas	Keterangan
Jatiroto	214	Prioritas 1	Rentan
Kaliboto Lor	105	Prioritas 1	Rentan
Sukosari	63	Prioritas 2	Waspada
Rojopolo	84	Prioritas 2	Waspada
Kaliboto Kidul	58	Prioritas 3	Tahan
Banyuputih Kidul	35	Prioritas 3	Tahan

Tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat 2 desa yang termasuk dalam kategori Prioritas 1 (Rentan) yaitu Desa Jatiroto dan Desa Kaliboto Lor, sementara terdapat 2 desa yang termasuk dalam kategori Prioritas 2 (Waspada) yaitu Desa Sukosari dan Desa Rojopolo.

Urutan prioritas berdasarkan indikator jumlah kematian balita dan ibu melahirkan masing-masing desa di Kecamatan Jatiroto adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Urutan Prioritas berdasarkan Indikator Jumlah Kematian Balita dan Ibu Melahirkan

Nama Desa	Jumlah Kematian Balita dan Ibu Melahirkan	Prioritas	Keterangan
Kaliboto Lor	1	Prioritas 1	Rentan
Jatiroto	0	Prioritas 3	Tahan
Kaliboto Kidul	0	Prioritas 3	Tahan
Sukosari	0	Prioritas 3	Tahan

Rojopolo	0	Prioritas 3	Tahan
Banyuputih Kidul	0	Prioritas 3	Tahan

Tabel 6 menunjukkan bahwa hanya 1 desa yang termasuk dalam kategori Prioritas 1 (Rentan) yaitu Desa Kaliboto Lor dengan jumlah kematian ibu sebanyak 1 orang. Sementara 5 desa lainnya yaitu Desa Banyuputih Kidul, Desa Rojopolo, Desa Sukosari, Desa Kaliboto Kidul, dan Desa Jatiroto termasuk dalam Prioritas 3 (Tahan).

Urutan prioritas berdasarkan indikator jumlah sarana/fasilitas kesehatan masing-masing desa di Kecamatan Jatiroto adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Urutan Prioritas berdasarkan indikator Jumlah Sarana/Fasilitas Kesehatan

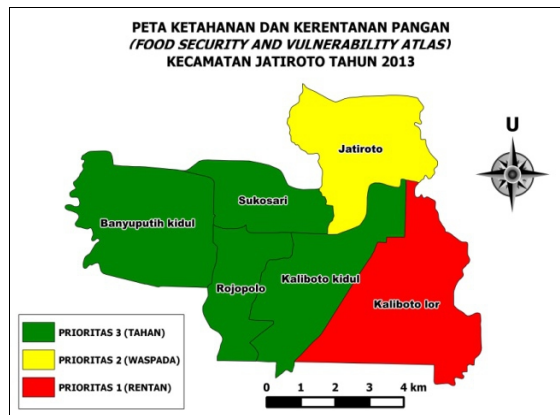
Nama Desa	Jumlah Sarana/Fasilitas Kesehatan	Prioritas	Keterangan
Sukosari	10	Prioritas 1	Rentan
Banyuputih Kidul	11	Prioritas 1	Rentan
Rojopolo	14	Prioritas 2	Waspada
Jatiroto	28	Prioritas 3	Tahan
Kaliboto Lor	28	Prioritas 3	Tahan
Kaliboto Kidul	17	Prioritas 3	Tahan

Tabel 7 menunjukkan bahwa terdapat 2 desa yang termasuk dalam kategori Prioritas 1 (Rentan) yaitu Desa Sukosari dan Desa Banyuputih Kidul, sementara hanya 1 desa yang termasuk dalam kategori Prioritas 2 (Waspada) yaitu Desa Rojopolo.

Situasi Kerentanan Pangan Komposit dan Indikator yang Paling Berpengaruh terhadap Kerentanan Pangan di Kecamatan Jatiroto

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan program Minitab 16.0 menggunakan *Principal Component Analysis* dan *Cluster Analysis* menunjukkan bahwa desa yang menjadi Prioritas 1 terhadap kerentanan pangan di Kecamatan Jatiroto adalah Desa Kaliboto Lor dengan indikator yang paling berpengaruh adalah jumlah penderita gizi kurang dan gizi buruk, persentase penduduk tanpa akses listrik, dan persentase penduduk miskin. Desa yang menjadi Prioritas 2 terhadap kerentanan pangan di Kecamatan Jatiroto adalah Desa Jatiroto dengan indikator yang sama dengan indikator pada Desa Kaliboto Lor. Desa yang menjadi Prioritas 3 terhadap kerentanan pangan di Kecamatan Jatiroto adalah Desa Banyuputih Kidul, Desa Rojopolo, Desa Sukosari, Desa Kaliboto Kidul dengan indikator yang paling berpengaruh adalah jumlah penderita gizi kurang dan gizi buruk, persentase penduduk miskin dan persentase penduduk tanpa akses listrik.

Peta ketahanan dan kerentanan pangan berdasarkan hasil analisis komposit seluruh indikator terdapat gambar berikut:



Gambar Peta FSVA Berdasarkan Hasil Analisis Komposit Seluruh Indikator

Pembahasan

Pada indikator jumlah warung/toko kelontong terdapat 2 desa yang berada dalam kategori Prioritas 1 (rentan) dan 2 desa berada pada kategori Prioritas 2 (Waspada). Salah satu pilar RAD-PG tahun 2011-2015 di Kabupaten Lumajang adalah peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam dengan arah kebijakan pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan [8]. Penelitian ini tidak sesuai dengan kebijakan tentang ketahanan pangan pada RAD-PG Kabupaten Lumajang tahun 2011-2015. Berdasarkan kebijakan tersebut dapat dikatakan bahwa desa di Kecamatan Jatiroto tersebut memiliki kendala dalam akses pangan dikarenakan jumlah warung/toko kelontong sehingga distribusi pangan kurang. Kurangnya distribusi pangan yang merata mengakibatkan desa yang rentan tersebut akan mengalami kerawanan pangan. Alasan tersebut didukung dengan teori yang dikemukakan Ermawati (2011) bahwa derajat ketahanan pangan menjadi rendah apabila terdapat kendala pada tingkat akses terhadap pangan karena distribusi yang kurang merata [5]. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Jatiroto terjadi kerentanan pangan karena semakin sedikit sumber pangan maka keterjangkauan pangan juga semakin rendah sehingga konsumsi pangan juga akan rendah dan terjadilah kerentanan pangan.

Pada indikator persentase penduduk miskin terdapat 2 desa yang berada pada kategori Prioritas 1 (Rentan) dan 2 desa berada pada kategori Prioritas 2 (Waspada). Penelitian sebelumnya mengenai peta FSVA di Kabupaten Bogor tingkat kecamatan, ada 2 kecamatan yang masuk dalam Prioritas 2, hal ini dikarenakan masalah kemiskinan di Kabupaten Bogor masih menjadi masalah yang utama kerawanan pangan dengan persentase rata-rata sebesar 8,65% [1]. Penelitian ini sesuai dengan

penelitian tersebut bahwa kerentanan terhadap kerawanan pangan disebabkan oleh kemiskinan bahwa semakin banyak jumlah orang miskin, semakin rendah daya akses secara ekonomi terhadap pangan, sehingga menyebabkan semakin tingginya derajat kerawanan pangan suatu wilayah. Alasan tersebut didukung dengan penelitian Panggabean (2013) bahwa kemiskinan turut mempengaruhi derajat ketahanan pangan penduduk miskin yang memiliki pendapatan rendah sehingga menyebabkan akses untuk mendapatkan pangan sebagai kebutuhan menjadi rendah pula dan berakibat pada konsumsi pangan yang tidak memenuhi kebutuhan sehingga terjadi kerawanan pangan [1]. Secara tidak langsung kemiskinan menjadi indikasi akan lemahnya ketahanan pangan akibat dampak tidak meratanya distribusi pendapatan dan seterusnya menjadikan mereka sebagai komunitas yang rawan pangan [6].

Pada indikator akses penghubung yang memadai, hanya ada 1 desa yang berada pada prioritas 3. Penelitian di Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa terdapat 6 kecamatan yang termasuk dalam Prioritas 1 (Rentan) sehingga akses jalan yang kurang memadai merupakan penyebab kerawanan pangan [1]. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya dikarenakan jalan utama desa di Desa Kaliboto Lor memiliki akses jalan yang kurang memadai sehingga biaya transportasi akan lebih tinggi dikarenakan jarak tempuh yang lebih jauh yang mengakibatkan tingginya harga pangan sampai pada konsumen. Selain itu dengan jarak tempuh yang lebih jauh akan mengakibatkan tidak meratanya distribusi pangan jika dibandingkan dengan desa lain yang tidak memiliki kendala dalam transportasi. Alasan tersebut didukung dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa infrastruktur memegang peranan penting bahwa kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan "kemiskinan lokal" sehingga kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai termasuk kebutuhan pangan yang cukup [9]. Kondisi infrastruktur juga akan berdampak pada harga pangan di suatu wilayah bahwa biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor yang melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai maka akan berakibat tingginya harga pangan di tingkat konsumen [9].

Pada indikator persentase penduduk tanpa akses listrik, terdapat 2 desa yang berada pada Prioritas 1 (Rentan) dan 2 desa berada pada kategori Prioritas 2 (Waspada). Secara tidak langsung listrik memegang peranan penting dalam ketahanan pangan. Berdasarkan penelitian Panggabean (2013) di

Kabupaten Bogor, hanya terdapat 1 kecamatan yang termasuk dalam Prioritas 1 karena masalah listrik di Kabupaten Bogor bukan merupakan masalah yang utama dengan rumah tangga tanpa akses listrik memiliki persentase sebesar 11,3% [1]. Hal ini berarti penelitian di Kecamatan Jatiroto berbeda dengan penelitian Panggabean karena banyaknya penduduk yang tidak memiliki akses terhadap listrik di Kecamatan Jatiroto merupakan indikator kemiskinan yang nyata sehingga menyebabkan akses pangan menjadi rendah sehingga terjadi kerentanan pangan. Alasan tersebut didukung dengan teori bahwa wilayah dengan akses listrik tinggi dan tersebar diseluruh wilayah akan meningkatkan dinamisasi kegiatan ekonominya sehingga angka kemiskinan di suatu wilayah akan berkurang [1]. Jika angka kemiskinan tinggi berarti *income* masyarakat rendah sehingga daya beli masyarakat akan kebutuhan akan pangan sebagai syarat asupan gizi yang cukup juga berpeluang besar tidak dapat dipenuhi [5].

Pada indikator jumlah penderita gizi kurang dan gizi buruk terdapat 2 desa yang berada pada Prioritas 1 (Rentan) dan 2 desa berada pada kategori Prioritas 2 (Waspada). Pada pilar pertama RAD-PG Kabupaten Lumajang tahun 2011-2015 mengenai perbaikan gizi masyarakat terdapat arah kebijakan yaitu peningkatan layanan kesehatan bagi para ibu pra-hamil, ibu hamil, bayi dan anak baduta [8]. Hasil penelitian di Kecamatan Jatiroto menunjukkan ketidaksesuaian dengan kebijakan pemerintah karena adanya status gizi yang rendah terutama pada kelompok rentan merupakan *output* dari ketahanan pangan yang rendah sehingga menjadikan kelompok rentan gizi tersebut menjadi kelompok rentan pangan. Alasan tersebut didukung dengan penelitian sebelumnya bahwa kerawanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi yang rendah [5]. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa status gizi balita merupakan salah satu indikator yang sangat baik digunakan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan pangan di suatu wilayah rendah [9]. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan [5].

Pada indikator jumlah kematian balita dan ibu melahirkan hanya terdapat 1 desa dengan kasus kematian ibu sebanyak 1 orang. Pada pilar pertama RAD-PG Kabupaten Lumajang tahun 2011-2015 mengenai perbaikan gizi masyarakat terdapat arah kebijakan yaitu peningkatan layanan kesehatan bagi para ibu pra-hamil, ibu hamil, bayi dan anak baduta [8]. Hasil penelitian di Kecamatan Jatiroto menunjukkan ketidaksesuaian dengan kebijakan

pemerintah bahwa salah satu kelompok rentan pada desa tersebut merupakan dampak dari kerentanan pangan di suatu wilayah adalah kematian balita dan ibu melahirkan yang berarti terjadi masalah gizi sebagai akibat rendahnya pemanfaatan pangan. Alasan tersebut didukung dengan penelitian sebelumnya bahwa selain balita, kematian pada ibu melahirkan dijadikan salah satu indikator kerentanan pangan suatu wilayah yang menunjukkan tingkat pemanfaatan wilayah tersebut [10]. Ibu hamil yang mengalami masalah gizi seperti KEK atau anemia mempunyai resiko kesakitan yang lebih besar terutama pada trimester III kehamilan. Akibatnya mereka mempunyai resiko yang lebih besar untuk melahirkan bayi BBLR, kematian saat persalinan, perdarahan dan gangguan pasca persalinan [11].

Pada indikator jumlah sarana/fasilitas kesehatan terdapat 2 desa yang berada pada Prioritas 1 (Rentan) dan 1 desa berada pada kategori Prioritas 2 (Waspada). Dalam pilar ke 5 pada RAD-PG Kabupaten Lumajang tahun 2011-2013 yaitu penguatan kelembagaan pangan dan gizi terdapat arah kebijakan yaitu penguatan koordinasi antar institusi di tingkat provinsi maupun kabupaten [8]. Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Jatiroto, desa yang rentan disebabkan karena jumlah sarana kesehatannya sedikit menunjukkan kurangnya akses masyarakat dalam mempertahankan status kesehatan yang optimal sehingga pemanfaatan terhadap pangan tidak optimal yang menjadikan desa tersebut menjadi rentan terhadap kerawanan pangan. Maka dari itu terdapat ketidaksesuaian dengan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah dalam RAD-PG. Alasan tersebut didukung dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan pentingnya fasilitas kesehatan untuk menurunkan angka kesakitan (morbiditas) penduduk dan dengan demikian akan meningkatkan kemampuan seseorang dalam menyerap makanan ke dalam tubuh dan memanfaatkannya [12]. Fasilitas ini merupakan wadah bagi masyarakat dalam melakukan tindakan kuratif atas permasalahan kesehatan, sekaligus kelembagaan yang terbangun merupakan sumberdaya bagi transfer informasi kesehatan dan meningkatkan kinerja ketersediaan pangan bagi terbentuknya kecukupan gizi masyarakat [5].

Pada hasil analisis komposit diketahui bahwa indikator yang paling berpengaruh adalah jumlah penderita gizi kurang dan gizi buruk, persentase penduduk tanpa akses listrik dan persentase penduduk miskin. Terdapat 5 pilar rencana aksi sebagaimana tercantum dalam RAD-PG Kabupaten Lumajang tahun 2011-2013 yang bertujuan untuk mengatasi tantangan masalah pangan dan gizi yang didalamnya berkaitan dengan masalah gizi kurang dan gizi buruk serta kemiskinan [8]. Hasil penelitian di Kecamatan Jatiroto menunjukkan ketidaksesuaian

dengan kebijakan yang dirumuskan pemerintah dalam menangani kerawanan pangan di Kabupaten Lumajang. Hal ini dikarenakan 3 indikator yang paling berpengaruh tersebut merupakan indikator kerentanan pangan dimana ketiganya memiliki hubungan timbal balik. Alasan tersebut didukung teori yang tercantum dalam buku pedoman BKP (2012) bahwa rendahnya ketahanan pangan rumah tangga berdampak pada munculnya permasalahan gizi dan kesehatan bagi anggota rumah tangga, terutama pada kelompok rentan [13]. Wilayah dengan akses listrik rendah akan menurunkan dinamisasi kegiatan ekonominya. Implikasi dari hal tersebut adalah bertambahnya angka kemiskinan di suatu wilayah. Demikian pula kaitannya dengan sarana perhubungan dan infrastruktur desa diperlukan sebagai syarat untuk memperlancar kegiatan ekonomi termasuk distribusi pangan, sehingga daerah yang akses infrastrukturnya kurang memadai menjadikan suatu daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan [5]. Masalah kerawanan pangan sudah menjadi fokus perhatian dan sangat erat berkaitan dengan masalah kemiskinan dimana dua fenomena tersebut saling terkait yang memiliki hubungan sebab akibat [14].

Simpulan dan Saran

Simpulan

Pada hasil analisis kerentanan pangan di masing-masing desa di Kecamatan Jatiroto, desa yang menjadi Prioritas 1 terhadap kerentanan pangan di Kecamatan Jatiroto adalah Desa Kaliboto Lor dengan indikator yang paling berpengaruh adalah jumlah penderita gizi kurang dan gizi buruk, persentase penduduk tanpa akses listrik, dan persentase penduduk miskin. Desa yang menjadi Prioritas 2 terhadap kerentanan pangan di Kecamatan Jatiroto adalah Desa Jatiroto dengan indikator yang sama dengan indikator pada Desa Kaliboto Lor. Desa yang menjadi Prioritas 3 terhadap kerentanan pangan di Kecamatan Jatiroto adalah Desa Banyuputih Kidul, Desa Rojopolo, Desa Sukosari, Desa Kaliboto Kidul dengan indikator yang paling berpengaruh adalah jumlah penderita gizi kurang dan gizi buruk, persentase penduduk tanpa akses listrik dan persentase penduduk miskin.

Saran

Adapun saran yang ditawarkan oleh peneliti sebagai bahan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang maupun Pemerintah Kecamatan Jatiroto dalam mengatasi masalah kerentanan pangan antara lain perencanaan dan penerapan intervensi multisektoral untuk mengatasi masalah gizi kurang dan gizi buruk, perencanaan dan penerapan intervensi untuk mengatasi masalah akses

listrik atau mengupayakan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya listrik alternatif, serta perencanaan dan penerapan intervensi untuk mengatasi masalah kemiskinan. Bagi peneliti selanjutnya apabila hendak dilakukan penelitian lanjutan mengenai kerentanan pangan pada tingkat desa, maka diperlukan kehati-hatian dalam menyesuaikan data yang dikumpulkan dengan indikator FSVA. Sebaiknya penelitian selanjutnya melengkapi kategori prioritas kerawanan pangan menjadi 6 prioritas dengan menambah jumlah objek (desa) yang akan dianalisis.

Daftar Pustaka

- [1] Panggabean SFT. Analisis kerawanan pangan menurut kecamatan di kabupaten bogor tahun 2011. Skripsi. Tidak diterbitkan. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor; 2013.
- [2] DKP. Peta ketahanan dan kerentanan pangan indonesia. Jakarta: Dewan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian; 2009.
- [3] Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Laporan bulan penimbangan agustus 2013. Tidak diterbitkan. Lumajang: Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang; 2013.
- [4] Rahmah I. Analisis hubungan akses fisik, akses ekonomi, dan pengetahuan gizi terhadap konsumsi pangan mahasiswa IPB. Skripsi. Tidak diterbitkan. Bogor: Departemen Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor; 2006.
- [5] Ermawati RO. Analisis ketahanan pangan rumah tangga miskin pada daerah rawan banjir di kecamatan jebres kota surakarta. Skripsi. Tidak diterbitkan. Surakarta: Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret; 2011.
- [6] Tanziha I. Analisis peubah konsumsi pangan dan sosial ekonomi rumahtangga untuk menentukan determinan dan indikator kelaparan. Disertasi. Tidak diterbitkan. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor; 2005.
- [7] Purwantini TB, Mewa A, Yuni M, Analisis kerawanan pangan wilayah dalam perspektif desentralisasi pembangunan. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. JEP. 2010; 1-11.
- [8] Bappeda Kabupaten Lumajang. Rencana aksi daerah pangan dan gizi Kabupaten Lumajang tahun 2011-2015. Tidak diterbitkan. Lumajang: Bappeda Kabupaten Lumajang; 2014.
- [9] Purwaningsih Y. Ketahanan pangan: situasi, permasalahan, kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. JEP. 2008 Juni; 9(1): 1-27.
- [10] Suhartono. Indikator dan pemetaan daerah rawan pangan dalam mendeteksi kerawanan pangan di kecamatan tanjung bumi kabupaten bangkalan. Bangkalan: Universitas Trunojoyo. JE. ISSN: 0216-0188. 2010 Desember; 1(2), 97-110.
- [11] Kaddour C, Souissi R, Haddad Z, Zaghoudi Z, Magouri M, Saussi M, et al. Causes and risk factors of maternal mortality in the ICU. Rockville Pike: U.S. National Library of Medicine. JCC. 2008 Maret; 12(2): 1
- [12] Pramoedy H, Muhaimin AW, Maghfoer MD, Sari S, Saskara IBE. Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan di kabupaten ponorogo. Malang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada; 2010.
- [13] BKP. Pedoman penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) kabupaten. Jakarta: Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian; 2012.
- [14] Adi A, Anis C, Dini RA. Balita dan WUS pada keluarga miskin di wilayah prioritas kerawanan pangan sebagai sasaran prioritas utama akselerasi peningkatan kualitas anak dan perempuan indonesia. Surabaya: Departemen Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga. Paper Child Poverty and Social Protection Conference; 2011: 1-22.
- [15] Dianati YN, Ni WSW, Rahma F. Pemodelan kerawanan pangan dan kemiskinan dengan geographically weighted multivariate linier model di kabupaten sampang. JNB. Malang: Program Studi Statistika, Jurusan Ilmu Matematika, Fakultas MIPA, Universitas Brawijaya. 2014 April; 2 (3): 1-7.